



Efisiensi, Legislatif Minta Pemkot Manfaatkan Aset Milik Daerah

JOGIA - Memasuki pertengahan tahun ini, legislatif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai bersiap menghadapi potensi efisiensi. Sebab, kebijakan tersebut bisa saja kembali digulirkan oleh pemerintah pusat pada 2026 mendatang.

Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengatakan, efisiensi anggaran memang cukup menjadi persoalan. Sebab sampai

sekarang cukup banyak program pembangunan di Kota Jogja yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Kuncoro ingin Pemkot mulai memaksimalkan berbagai potensi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga bisa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada transfer anggaran pusat.

Dia menilai, masih ada beberapa potensi sumber pendapatan yang belum terlalu dilirik oleh Pemkot

Jogja. Misalnya dari sisi pemanfaatan aset milik daerah. Kuncoro mendorong Pemkot mulai memetakan aset daerah apa saja yang bisa dijadikan sumber pendapatan.

"Pemanfaatan aset daerah saya melihat masih kurang optimal," ujar Kuncoro saat dikonfirmasi lewat pesan singkat kemarin (27/7).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, pada kondisi saat ini kemandirian daerah

memang menjadi sebuah keharusan. Sebab jika Pemkot terus mengandalkan kucuran dana pemerintah pusat, maka akan jadi kendala pembangunan daerah.

Kuncoro pun mendorong, agar Pemkot mulai melakukan inovasi untuk menggaet berbagai sumber pemasukan. Sebab target tahun ini cukup berat karena harus bisa meraih PAD sebesar Rp 1 triliun.

"Iklim investasi harus dijaga, agar

perekonomian daerah bisa terus tumbuh," pesannya.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hastowo Wardoyo menyampaikan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan dari anggaran pemerintah pusat. Namun di tingkat daerah masyarakat bisa berkontribusi lewat pembayaran pajak.

Dia menyebut, salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangu-

nan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemasukan pajak dari sektor itu memiliki peran vital dalam mendanai berbagai program publik.

Misalnya, dapat digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik. Mulai dari pengelolaan sampah, pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia, pembangunan rumah tidak layak huni, sekolah gratis bagi penyandang disabilitas, hingga penataan kawasan kota. **(inu/eno/f)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005